

**PEMIKIRAN
HUKUM**
SPIRITUAL PLURALISTIK
sisi lain hukum yang terlupakan

PEMIKIRAN HUKUM

SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :-

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 085100563938, 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : Oktober 2016

E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xviii + 545 hlm , 16 x 24 cm

ISBN 978-602-1351-57-4

DAFTAR ISI

Esmi Warassih Pujirahayu, Sekilas Pintas –i

Pengantar –iii

Esmi Warassih Pujirahayu

**Prawacana Membaca Esmi Warassih Melalui
Hukum Spiritual Pluralistik –v**

Jarot Jati BS

Daftar Isi –xv

BAGIAN I

TAWARAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

**Nilai Religius, Moral dan Hukum dalam Pandangan Esmi Warassih:
Sebuah Analisis Sosial Religius –3**

Muhammad Nur Islami

**Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplatif pada Penelitian Budaya
Hukum –23**

Teddy Asmara

Dari Pleburan untuk Keadilan –41

Yudi Kristiana

**Menciptakan Hakim yang Spiritual Pluralistik (Pendekatan Spiritualisme
Sebagai Solusi Problematika Hukum dan Etika Para Hakim) –57**

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Merefleksikan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Esmi Warassih –71

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

**Hermeneutika Hukum Progresif (Upaya Mendalami dan
Mengembangkan) –87**

Faisal

BAGIAN II

EKOLOGI BERKEADILAN, AGRARIA, DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

**Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial
Budaya –113**

Jamal Wiwoho

Budaya Hukum Kalangan Birokrat dalam Pembangunan Kebijakan Lingkungan Hidup –129

Mella Ismelina FR

Membangun Kebijakan Lingkungan yang Berbasis Kearifan Lokal –141

Jawade Hafids

Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia –151

M. Syamsudin

Membangun Konsep Kebijakan Lingkungan yang Berkeadilan Ekologi –167

M. Muslih

Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Menuju Pengelolaan Lingkungan Yang Berkeadilan Ekologi –179

Dyah Adriantini Sintha Dewi

Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Ecoliteracy –189

Derita Prapti Rahayu

Reorientasi Politik Hukum Pertanahan Berdasarkan Konsep Hukum Prismatik –197

Andria Luhur Prakoso

Fungsi Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Penyelesaian Konflik NKRI-RDTL –207

Dominikus Rato

Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkearifan Lokal –227

Erna Dewi

Peran Desa Pakraman dalam Pengelolaan Objek Wisata Setelah Berlakunya

UU NO. 32/2004 –243

Ni Nyoman Sukerti

Kelumpuhan Pendekatan Dogmatis pada Penyelesaian Krisis Sumber Daya Air di Kawasan Gunung Muria Kabupaten Kudus –255

Hidayatullah

Reposisi Cara Pandang Negara Terhadap Hukum Adat –265

Sulaiman

BAGIAN III

PENEGAKAN HUKUM YANG SPIRITUALIS DAN HUMANIS

Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual – 277

Maroni

Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral: Penyemaian Nilai-Nilai Spiritual Dan Humanis Penegakan Hukum di Indonesia (Telaah Konstruktivisme Dalam Membangun Kultur Hukum) – 293

Slamet Haryadi

***Restorative Justice* dalam Tradisi Masyarakat Indonesia dan Relevansinya untuk Penyelesaian Perkara Pidana ke Depan – 307**

Achmad Irwan Hamzani

Membangun Penegakan Hukum Bernurani – 323

Dwi Haryadi

Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat – 333

Fitriati

Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak – 345

Nikmah Rosidah

Penegakan Hukum yang Spiritualis dan Humanis dalam Relasinya dengan Cinta Tanah Air – 355

Subarkah

Pengakomodasian Aspek Spiritualitas dalam Hukum Pidana (Kajian Terhadap Asas Legalitas Dan culpabilitas) – 365

Kuswardani

Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di Indonesia – 375

Darwance

Prospektif Hukum Pidana dalam Pandangan Filosofis – 383

Kamri Ahmad

BAGIAN IV

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERBASIS NILAI MORAL DAN SPIRITUAL

Politik Hukum Pemekaran Daerah Ideal dan Berbasis Kearifan Lokal – 401

Lintje Anna Marpaung

Model Peradilan Tipikor Berbasis IT di Daerah Kepulauan Sebagai Implementasi Beracara Cepat, Biaya Ringan dan Sederhana –417

Sulistiyanta, Aksi Sinurat, Jauhari Effendi

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kepolisian dan Kejaksaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif: dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan –435

Sulistiyowati

Pembangunan Hukum Pertambangan Berbasis *Ecolocalwisdom Restoration Ecology* (Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia) –447

Martha Pigome

Relevansi Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani –471

Endang Sutrisno

Perlindungan Atas Hak Anak Muslim yang Lahir pada Perkawinan Tidak Dicatat –493

Amnawaty

Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Hukum Progresif –503

Jamiat Akadol

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penerapan Qanun Jinayat –527

Sulaiman

Rekonstruksi Kebijakan Publik Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Berbasis Nilai Moral dan Spiritual –535

Suparnyo